

**PERSEPSI DAN SIKAP PARA PIHAK TERHADAP LANSKAP
BERHUTAN DI KOTA PAGARALAM, DAS MUSI HULU
SUMATERA SELATAN**

*(Stakeholder's Perception and Attitude Toward Forested Landscape at Kota
Pagaralam, The Upper Musi Watershed, South Sumatera)*

Edwin Martin¹, Bambang Tejo Premono² & Ari Nurlia³

^{1,2,3}Balai Penelitian Kehutanan Palembang, Jl. Kol. H. Burlian Punti Kayu
Km 6,5. Telp/Fax 414864 Palembang, E-mail : abinuha1976@yahoo.co.id

Diterima 18 Juli 2012, disetujui 1 Agustus 2012

ABSTRACT

Problems of deforestation in the upstream watershed site can not be stopped or slowed down by current policies and programs, therefore other approaches are still required in accordance with the dynamics of socio-economics condition of local communities. This study was intended to answer questions about how to start a forest landscape management in upland areas, through case study in the Pagaralam, South Sumatra. Research is done by a survey of stakeholders who have interests and power on the forested landscape in Pagaralam. Data were analyzed with nonparametric statistics, and then discussed with the parties through FGD. The results showed that the actors in the government and land users have different perceptions and attitudes in assessing forested landscape. In addition to the importance of awareness-raising for land users through the media that raise environmental issues, program priorities to initiate the management of forest landscapes in the upper basin include replanting and protecting springs and along side of the river.

Keyword : Forested landscape, upland, upper watershed, perception.

ABSTRAK

Masalah deforestasi di DAS bagian hulu tidak dapat dihentikan atau diperlambat oleh kebijakan dan program yang berlaku saat ini, sehingga masih diperlukan pendekatan lain yang sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi kondisi masyarakat lokal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana memulai manajemen lanskap hutan di daerah dataran tinggi, melalui studi kasus di Pagaralam, Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan melalui survei terhadap para pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan pada lanskap hutan di Pagaralam. Data hasil survei dianalisis dengan statistik non parametrik, kemudian dibahas dengan para pihak melalui FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para aktor pemerintah dan pengguna lahan memiliki persepsi dan sikap yang berbeda dalam menilai lanskap berhutan. Selain pentingnya peningkatan kesadaran bagi pengguna lahan melalui media yang mengangkat isu-isu lingkungan, prioritas program untuk memulai pengelolaan lanskap hutan adalah penanaman kembali dan melindungi daerah sekitar mata air dan kanan kiri sisi sungai.

Kata kunci : Lanskap berhutan, dataran tinggi, DAS hulu, persepsi

I. PENDAHULUAN

Saat ini, agen utama penyebab deforestasi tidak lagi hanya oleh peladang berpindah dan petani skala kecil saja, namun oleh usaha-usaha berbasis kapital (Boucher, 2010; Rudel *et al.*, 2009). Karenanya, konsentrasi penanganan masalah-masalah deforestasi dalam kerangka perubahan iklim lebih banyak diarahkan di daerah dataran rendah seperti lahan gambut, yang berpotensi besar sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi, sementara di wilayah dataran tinggi dan pegunungan sebagai hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) sedikit terabaikan. Padahal, di Pulau Sumatera, tutupan hutan yang tersisa lebih terkonsentrasi di area sepanjang Bukit Barisan, sebagai bagian hulu DAS-DAS di Sumatera.

Salah satu contoh DAS bagian hulu yang kini masih berkuat pada persoalan deforestasi adalah Sub DAS Lematang yang terletak di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Meskipun sejak tahun 2003 Pemerintah Kota Pagaralam telah menggalakkan program penanaman pohon yang bersifat wajib bagi Pegawai Negeri Sipil, namun, sampai sekarang dampak lingkungan kerusakan hutan masih tetap dikeluhkan para pihak. Pada musim kemarau sawah dan air terjun sebagai objek wisata seringkali mengalami kekeringan, sementara banjir bandang selalu menghantui pada saat datangnya hujan (Sumeks, 13 September 2011, 31 Oktober 2011, 17 November 2011). Seluas 7.950 ha dari 8.740 ha jumlah total hutan lindung telah mengalami kerusakan dan beralih fungsi menjadi lahan pertanian atau lahan kritis (Sindo, 10 Februari 2011). Situasi ini makin diperparah oleh meluasnya alih guna lahan hutan di daerah perbukitan dan sekitar Gunung Dempo menjadi kebun-kebun sayur (Sumeks, 27 Agustus 2011; Republika, 21 November 2011). Keadaan ini menunjukkan

bahwa masalah deforestasi pada taraf tapak atau mikro DAS hulu belum dapat dihentikan atau diperlambat melalui pendekatan struktural kebijakan dan program yang berlaku sekarang, sehingga masih diperlukan pendekatan lain yang sesuai dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal.

Teori transisi hutan menyebutkan bahwa deforestasi di suatu wilayah akan terus terjadi sebagai akibat urbanisasi dan industrialisasi, kemudian suatu waktu akan mengalami pemulihan lagi atau reforestasi (Rudel *et al.*, 2005; Mather, 2007). Menurut Angelsen (1999) deforestasi untuk membuka lahan pertanian seringkali menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia bagi kehidupan petani yang hidup di sekitar hutan. Jika demikian, maka deforestasi yang masih terjadi sebagaimana kasus di Pagaralam adalah sesuatu yang tak terelakkan. Pada situasi ini, tugas pemerintah adalah mempertahankan tutupan hutan yang tersisa dan mendorong reforestasi pada bentang lahan (lanskap) yang memiliki nilai konservasi tinggi. Bagaimana, dimana dan bersama siapa kebijakan konservasi dan penanaman kembali lanskap hutan tersebut akan dilakukan bergantung kepada status perilaku para pihak yang berinteraksi dengan lanskap. Persepsi dan sikap para pihak menggambarkan perilaku yang telah, sedang dan akan mereka lakukan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana memulai pengelolaan lanskap hutan di daerah dataran tinggi yang masih mengalami deforestasi, melalui contoh kasus di Kota Pagaralam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi dan sikap para pihak terhadap nilai penting hutan dalam skala lanskap sub DAS Lematang Kota Pagaralam, Sumatera Selatan.

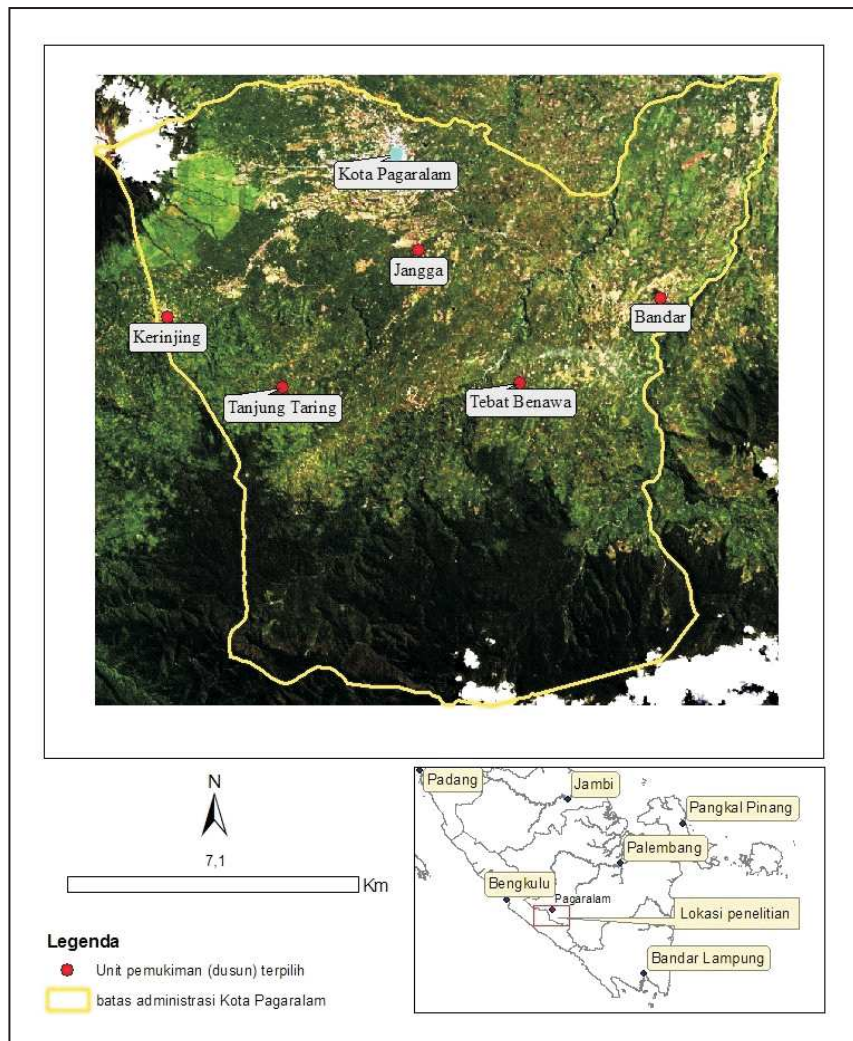
II. METODE PENELITIAN

A. Konteks dan Penentuan Para Pihak

Kota Pagaram mulai berdiri sendiri sebagai daerah otonom dan terpisah dari Kabupaten Lahat sejak tahun 2001. Sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan, Pagaram terletak sekitar 298 km dari Palembang (Ibukota Provinsi) serta berjarak 60 km di sebelah barat daya Lahat (Ibukota Kabupaten Lahat). Kota Pagaram memiliki luas wilayah ± 63.366 ha, yang terbagi menjadi lima kecamatan yaitu Dempo Selatan, Dempo

Tengah, Dempo Utara, Pagaram Selatan dan Pagaram Utara. Kota ini memiliki tingkat kepadatan penduduk 195 jiwa/km².

Sebagian besar keadaan tanah di Pagaram berasal dari jenis latosol dan andosol dengan bentuk permukaan bergelombang sampai berbukit (Gambar 1). Tipologi tanah di Pagaram tergolong subur. Sebagian besar areal yang berada tidak jauh dari pemukiman dijadikan lahan usahatani, seperti sayur mayur, kopi, coklat dan buah-buahan, terutama di areal yang bergelombang dan berbukit. Desa-deserta tertentu di sisi utara merupakan areal penghasil beras dengan persawahan yang luas.



Gambar 1. Citra lanskap Kota Pagaram sebagai lokasi penelitian
Figure 1. Image of Pagaram landscape as case study site

Kota Pagaralam termasuk ke dalam hulu Sub DAS Lematang, DAS Musi. Sebagai hulu DAS, wilayah Kota Pagaralam dipenuhi oleh sungai-sungai kecil dan ratusan mata air, serta didominasi lahan dengan kemiringan lebih dari 40%. Selain Sungai Lematang yang berada di sisi tengah wilayahnya, terdapat sungai-sungai lain seperti Selangis Besar, Selangis Kecil, Air Kundur, Air Perikan, Endikat dan puluhan sungai-sungai lainnya yang berperan sebagai penyokong kehidupan masyarakat di Pagaralam dan sekitarnya. Deskripsi Kota Pagaralam ini berimplikasi pada kebutuhan untuk mengelola lanskapnya sebagai areal yang selayaknya didominasi oleh vegetasi hutan.

Meskipun secara lanskap wilayah Pagaralam idealnya didominasi oleh vegetasi hutan, namun pada kenyataannya areal yang masih berhutan kian hari makin menyempit. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagaralam melaporkan telah terjadi deforestasi seluas 7.950 ha dari 28.740 ha keseluruhan areal kawasan hutan lindung (Sindo, 10 Februari 2011). Deforestasi ini dilakukan oleh petani untuk membuka kebun kopi atau sayur. Selain hutan yang terletak di areal kawasan hutan lindung, deforestasi juga terjadi pada hutan-hutan di perbukitan, sepanjang aliran sungai dan mata air yang berada di luar kawasan hutan. Hal ini terindikasi dari luasnya lahan kritis dan sangat kritis yang dilaporkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (2009) untuk areal di luar kawasan hutan di Kota Pagaralam, yaitu 13.070,36 ha, sementara di dalam kawasan hutan mencapai 11.554,60 ha. Secara total, lahan yang tergolong kritis dan sangat kritis mencapai 24.625,16 ha atau hampir 40% dari total keseluruhan wilayah Kota Pagaralam.

Dalam konteks kesatuan wilayah DAS, area administrasi Kota Pagaralam meliputi lanskap hulu yang berbukit sampai bergunung dan hilir yang relatif datar sampai

bergelombang. Wilayah hulu adalah hutan lindung Bukit Jambul sebagai daerah sumber mata air dan ratusan anak sungai. Tutupan lahan di wilayah hulu kini adalah hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, kebun ladang masyarakat dan beberapa kantong pemukiman masyarakat. Tata guna lahan usahatani di wilayah hulu didominasi oleh kebun kopi dan sayur. Wilayah hilir pada umumnya merupakan pusat pemukiman penduduk/perkampungan, sawah, tegalan dan kebun masyarakat. Masyarakat di hilir mengandalkan sawah sebagai sumber nafkah keluarga, namun biasanya tetap mengusahakan kebun kopi.

Para pihak (*stakeholders*) didefinisikan oleh Freeman (1984 dalam Ramirez 1999) sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi pencapaian tujuan bersama. Namun, menurut Ramirez (1999), dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, definisi Rolling dan Wagemakers (1998) lebih mengena, yakni kelompok atau individu yang menggunakan dan mengelola sumberdaya alam. Oleh karena itu, selain pemerintah kota sebagai pihak yang berpengaruh, para pihak dalam penelitian ini adalah mereka yang menggunakan lahan di wilayah hulu (petani kopi dan sayur) dan hilir (petani sawah).

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data persepsi para pihak terhadap nilai penting lanskap berhutan di Kota Pagaralam dilakukan dengan cara survei yang dilengkapi dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Unit analisis dalam penelitian ini adalah lanskap di sekitar Sungai Lematang yang termasuk dalam wilayah administrasi Kota Pagaralam, sehingga perwakilan para pihak ditentukan secara sengaja berdasarkan posisi sentral suatu komunitas sebagai pengguna lahan. Petani kopi diwakili oleh masyarakat Dusun Tebat Benawa dan Tanjung Taring

yang berada di sisi selatan lanskap Pagaralam dan berbatasan langsung dengan kawasan berhutan (*forest frontier*). Petani padi direpresentasi oleh masyarakat Dusun Jangga dan Bandar, tempat yang dikenal sebagai penghasil beras. Petani sayur diwakili masyarakat Dusun Kerinjing, sebagai sentra perkebunan sayur. Ketiga pihak ini disebut sebagai kelompok masyarakat. Pihak pemerintah kota diwakili oleh aktor-aktor yang berasal dari dinas instansi yang terkait langsung dengan lanskap, yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Pertanian dan Hortikultura (Distan), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) dan camat. Pihak lain yang memiliki kepentingan dan pengaruh baik terhadap lanskap maupun para pihak adalah para ketua RW. Mereka adalah warga dusun yang dipilih oleh masyarakat

sebagai pemimpin dusun, menggantikan peran kepala desa pada era sebelum Pagaralam memisahkan diri dari Kabupaten Lahat.

Survei dilakukan terhadap petani dan aktor pada setiap kelompok pihak dengan cara wawancara. Partisipan kelompok petani dipilih secara insidental pada setiap dusun terpilih. Partisipan adalah kepala keluarga petani yang pada saat penelitian berlangsung sedang berada di rumah dan bersedia untuk melakukan wawancara. Karena keterbatasan sumberdaya (waktu dan dana), jumlah partisipan di setiap dusun dibatasi sebanyak 30 kepala keluarga. Wawancara dibantu oleh enumerator lokal yang mentranslasi bahasa di kuesioner ke dalam bahasa yang mudah dipahami partisipan. Wawancara terhadap kelompok pemerintah kota, termasuk dengan ketua RW, dilakukan sendiri oleh tim peneliti. Wawancara terhadap para pihak ini menggunakan satu dokumen kuesioner. Jumlah dan asal partisipan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan asal partisipan penelitian
 Table 1. *The amount and origin of research participants*

No.	Unsur pihak (<i>Group of party</i>)	Asal pihak (<i>Origin</i>)	Jumlah partisipan (<i>Amount of participant</i>)
1.	Petani kopi (kebun campuran)	Dusun Tebat Benawa, Dusun Tanjung Taring	60 orang
2.	Petani padi sawah	Dusun Jangga, Dusun Bandar	60 orang
3.	Petani sayur	Dusun Kerinjing	30 Orang
4.	Ketua RW (mantan kepala desa)	Dusun Tebat Benawa, Dusun Tanjung Taring, Dusun Jangga, Dusun Bandar, Dusun Kerinjing, Dusun Benua Keling, dan Dusun Semidang Alas	7 orang
5.	Camat	Pagaralam Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara	3 orang
6.	SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Pertanian dan Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.	5 orang

Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini berisi daftar pernyataan tentang nilai penting keberadaan hutan dan sikap para pihak terhadap lanskap berhutan. Daftar pernyataan nilai penting keberadaan hutan disusun berdasarkan manfaat ekonomis, ekologis dan sosial hutan yang disebut dalam penelitian Dolisca *et al.* (2007). Partisipan mengungkapkan keyakinan terhadap pernyataan nilai penting hutan dengan memilih enam pilihan tanggapan, yaitu tidak tahu, sangat salah, salah, ragu-ragu, benar dan sangat benar. Daftar pernyataan tentang idealisme konservasi hutan pada lanskap tertentu disusun secara normatif dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Partisipan menunjukkan sikapnya terhadap pernyataan normatif nilai penting hutan pada lanskap tertentu dengan memilih salah satu dari enam jawaban, yaitu tidak mengerti, sangat tidak setuju, setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju.

Persepsi dan sikap masyarakat terhadap nilai penting hutan pada lanskap tertentu didiskusikan secara formal dalam forum FGD, guna melengkapi data dan informasi yang diperoleh dari wawancara. FGD dilakukan bersama masyarakat Dusun Semidang Alas, di mana sebagian warganya merupakan petani kopi dan sebagian lain adalah petani sayur, sehingga dapat dianggap mewakili dua kelompok dominan pengguna lanskap. Dusun ini merupakan salah satu pintu masuk ke arah kawasan hutan lindung Bukit Jambul.

C. Analisis Data

Tanggapan partisipan penelitian terhadap pernyataan yang diajukan dalam wawancara dikuantifikasi melalui skala Likert, dimulai dari angka 1 untuk tidak tahu/mengerti, 2 untuk sangat salah/sangat tidak setuju, 3 untuk jawaban salah/tidak setuju, 4 untuk respon ragu-ragu, 5 untuk benar/setuju dan 6 untuk

respon sangat benar/setuju. Hasil kuantifikasi dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemusatan jawaban (rerata) setiap pernyataan yang diajukan dan setiap kelompok pihak. Perbedaan nilai persepsi antarpihak terhadap nilai penting hutan dianalisis melalui uji beda Mann-Whitney. Perbedaan sikap antarpihak terhadap konservasi hutan pada lanskap tertentu dianalisis melalui uji beda Kruskal-Wallis (Santoso, 2001).

Hubungan antara atribut partisipan penelitian dari kelompok masyarakat dengan sikapnya terhadap hutan pada lanskap tertentu dianalisis menggunakan korelasi Spearman dan Cramer. Penjelasan mengenai alasan-alasan dibalik persepsi para pihak dianalisis secara deskriptif kualitatif sebagai hasil dari FGD.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persepsi terhadap nilai penting hutan

Manusia menilai apakah suatu hutan penting atau tidak bagi diri dan lingkungannya berdasarkan informasi, pengalaman dan kepentingan masing-masing yang tidak selalu sama. Nilai penting hutan selalu dilihat dari 3 (tiga) fungsi, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Penelitian ini mendefinisikan hutan sebagai areal yang didominasi vegetasi berkayu atau pepohonan. Tabel 2 menampilkan nilai persepsi setiap kelompok kepentingan terhadap nilai penting eksistensi hutan di wilayah administrasi Kota Pagaralam.

Nilai penting hutan dari sisi ekologi direpresentasikan oleh peran ekosistem hutan, konservasi tanah dan air, suplai air dan udara bersih. Peran ekosistem hutan sebagai habitat flora fauna dibenarkan para pihak (nilai rerata lebih dari 5), meskipun kelompok petani sayur tidak terlalu meyakinkannya. Seluruh kelompok kepentingan meyakini peran hutan dalam

mencegah terjadinya banjir, namun peran mengurangi bahaya erosi tidak terlalu diyakini oleh kelompok petani kopi. Petani sayur dan kopi juga tidak terlalu yakin jika hutan memiliki peran dalam penyuplai air bersih, air bagi persawahan serta udara bersih. Keraguan

terhadap peran-peran ekologis hutan ini disampaikan paling sering oleh kelompok petani sayur. Kelompok pemerintah sangat meyakini semua atribut peran ekologis hutan. Nilai persepsi kelompok pemerintah tersebut berbeda nyata dengan nilai persepsi kelompok kepentingan lainnya.

Tabel 2. Nilai persepsi para pihak terhadap nilai penting hutan
 Table 2. Score of stakeholders perception toward forests roles

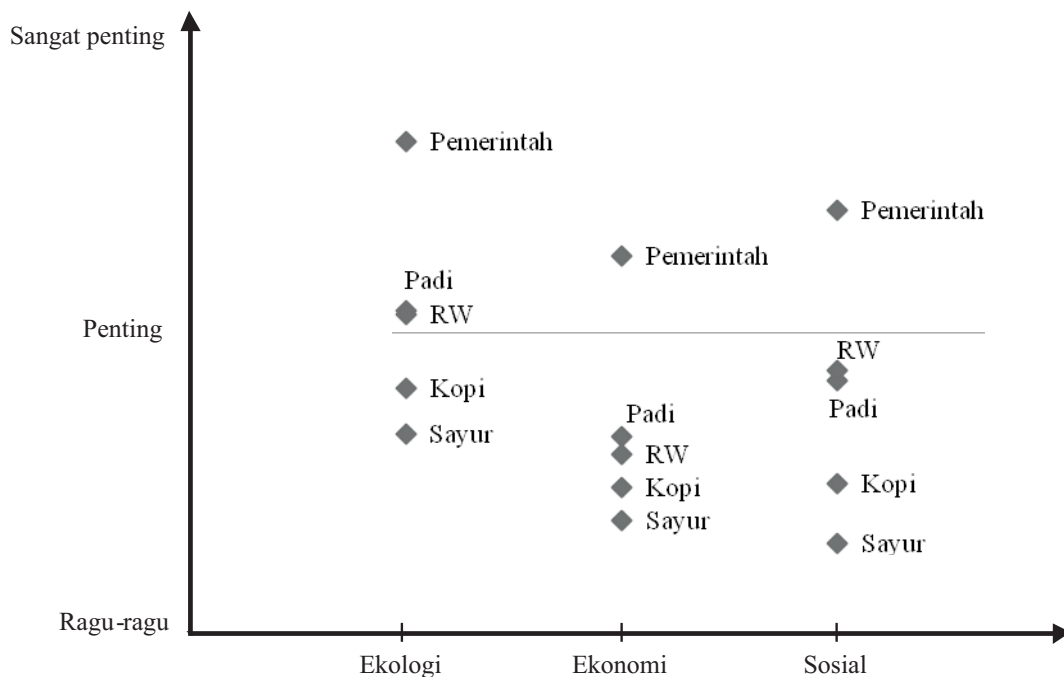
No.	Pernyataan (Statements)	Rataan nilai persepsi kelompok kepentingan (Mean score of stakeholders perception)					Signifikansi perbedaan (Significance of difference)
		Kopi (K)	Padi (P)	Sayur (S)	RW (R)	PEMDA (M)	
1.	Hutan menyediakan tempat bagi banyak tumbuhan dan hewan	5,02	5,16	4,83	5,25	5,88	M > R, P, K, S
2.	Hutan adalah tempat yang baik bagi anda untuk mengamati alam	4,62	4,95	4,07	5,00	5,25	M, R, P, K > S
3.	Hutan meningkatkan kualitas tanah	4,60	4,90	4,43	5,00	5,50	M > K, S
4.	Hutan mencegah banjir	5,05	5,21	5,07	5,25	5,75	M > P, S, K
5.	Hutan mengurangi erosi tanah	4,84	5,19	5,03	5,25	5,88	M > R, P, S, K
6.	Hutan meningkatkan ketersediaan air minum	4,75	5,14	4,63	5,00	5,75	M > P, R, K, S
7.	Hutan menjaga ketersediaan air sawah	4,90	5,04	4,77	4,75	5,63	M > P, K, S, R
8.	Hutan meningkatkan kualitas udara	4,75	5,04	4,47	5,00	5,75	M > P, R, K, S
9.	Menanam pohon menambah nilai kekayaan anda	4,60	4,80	4,4	4,25	5,50	M > P, K, S, R
10.	Hutan menarik kedatangan wisatawan	3,70	4,14	4,3	4,75	5,25	M > S, P, K
11.	Hutan meningkatkan hasil usaha pertanian	4,39	4,85	4,4	4,50	5,25	M > R, S, K
12.	Hasil hutan bukan kayu menambah penghasilan	4,73	4,92	4,17	5,00	5,38	M > K > S
13.	Hasil hutan kayu menambah penghasilan	4,19	4,06	4,23	4,50	4,88	M > S, K, P
14.	Hutan menyediakan sumber mata pencarian	4,54	4,47	4,23	4,00	5,13	M > K, P, S, R
15.	Menanam pohon meningkatkan peluang pendidikan anak-anak	4,70	4,98	4,3	4,75	5,50	M > P, R, K, S
16.	Menanam pohon berarti menyediakan kayu bangunan	5,00	5,02	4,93	5,00	5,25	M > P, K, R, S
17.	Menanam pohon berarti memperkuat masyarakat perdesaan	4,14	4,66	3,77	4,75	5,25	M > P, K, S
18.	Menanam pohon mendukung tanggung jawab lingkungan	4,70	5,16	4,17	5,00	5,50	M > K, S
19.	Pohon-pohon menciptakan damai bagi kehidupan	4,28	4,86	4,2	4,75	5,38	M > P, R, K, S
20.	Pejabat dan tokoh masyarakat menjadi contoh dalam menjaga dan membangun hutan.	4,87	4,69	5,03	5,00	5,63	M > S, R, K, P
Rataan per kelompok kepentingan		4,62	4,86	4,47	4,84	5,46	

Peran ekonomi lanskap berhutan secara umum dipandang dari nilai ekonomi kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa-jasa lingkungan. Para pihak meragukan hasil kayu dari hutan dapat menambah penghasilan masyarakat (Rerata nilai persepsi mendekati 4). Semua kelompok kepentingan kecuali pemerintah daerah juga meragukan usaha tanaman dan ekowisata hutan sebagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan di Pagaralam. Bagi kelompok petani sayur, hasil hutan bukan kayu tidak bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Hutan menurut semua kelompok kepentingan selain pemerintah daerah tidak dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Namun demikian, semua kelompok kepentingan memiliki persepsi yang sama bahwa menanam pohon dapat menyediakan kayu bangunan.

Petani sayur merupakan kelompok kepentingan yang paling meragukan nilai penting peran sosial eksistensi hutan di Kota

Pagaralam. Peran sosial hutan, seperti terciptanya kedamaian relasional, peningkatan status sosial desa hutan, kebanggaan terhadap citra penyelamat lingkungan diragukan oleh kelompok-kelompok pengguna lahan namun dibenarkan oleh kelompok pemerintah (Pemda dan ketua RW). Kelompok pemerintah daerah secara umum memiliki persepsi positif terhadap nilai penting fungsi hutan. Persepsi pemerintah daerah ini berbeda secara nyata dengan para pihak lainnya.

Gambar 2 menunjukkan sebaran nilai persepsi para pihak di Kota Pagaralam terhadap nilai penting hutan. Secara umum terlihat bahwa para pihak paling mengapresiasi fungsi ekologi dari eksistensi hutan. Ini berarti, pendekatan nilai-nilai ekologi hutan lebih tepat untuk menjadi pintu masuk pengelolaan hutan di Kota Pagaralam. Gambar ini juga memperlihatkan terjadinya kesenjangan persepsi yang luar biasa antara kelompok pemerintah daerah dengan kelompok petani sayur dan kopi.



Gambar 2. Posisi nilai persepsi para pihak terhadap nilai penting hutan
 Figure 2. Mapping of stakeholders perception scores toward forests roles

2. Sikap terhadap lanskap berhutan

Lanskap atau bentang lahan merupakan konfigurasi khusus dari topografi, penutupan vegetasi, tata guna lahan dan pola pemukiman yang membatasi beberapa ide aktivitas-aktivitas dan proses-proses alam dan budaya (Green *et al.*, 1996 dalam Arifin *et al.*, 2009). Lanskap berhutan mengacu kepada penampakan di atas permukaan bumi yang didominasi vegetasi pohon atau tanaman berkayu lainnya. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dan Keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung telah mengatur hubungan antara masyarakat dengan lanskap tertentu yang berhutan. Tabel 3 menyajikan sikap kelompok pengguna lahan di Pagaralam terhadap lanskap tertentu yang berdasarkan peraturan perundangan merupakan kawasan dilindungi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tiga kelompok dominan pengguna lahan di Pagaralam memiliki kesamaan sikap terhadap hutan yang berada di kawasan hutan lindung, namun berbeda sikap terhadap lanskap dilindungi lainnya yang berada di kawasan budidaya. Kelompok petani sayur cenderung bersikap tidak setuju jika hutan yang berada di atas lahan-lahan miring tidak boleh ditebangi. Sikap tersebut juga diikuti oleh petani kopi meskipun menunjukkan gejala keragu-raguan. Sikap ragu-ragu ditunjukkan pula oleh petani sayur tentang pentingnya mempertahankan hutan yang berada di kanan kiri sungai dan sekitar mata air. Perbedaan sikap yang mencolok umumnya terjadi antara petani sayur dan petani padi. Petani padi, meskipun tidak mutlak, cenderung setuju dengan perlindungan hutan pada lanskap tertentu. Secara umum, lanskap berhutan kurang disukai oleh kelompok petani sayur.

Tabel 3. Rataan nilai sikap kelompok pengguna lahan terhadap lanskap berhutan
 Table 3. Mean score of land users attitude toward forested landscape

No.	Pernyataan sikap (Statements of attitude)	Rataan nilai sikap kelompok kepentingan (Mean score of land users attitude)			Probabilitas (Probability)
		Kopi	Padi	Sayur	
1.	Hutan yang berada di kawasan hutan lindung tidak boleh ditebang.	5,17	5,285	5,07	0,97 ^{ns}
2.	Hutan yang berada di atas lahan yang kemiringannya lebih dari 45 derajat tidak boleh ditebangi, meskipun pada lahan milik.	4,345	4,71	3,73	0,000
3.	Lahan yang berada 50 meter dari kanan kiri sungai tidak boleh menjadi kebun dan tetap dibiarkan menjadi hutan.	4,52	4,915	4	0,000
4.	Lahan yang berada 200 meter di sekitar mata air tidak boleh diganggu dan dibiarkan sebagai hutan.	4,91	4,905	4,13	0,000
5.	Orang yang berkebun di sekitar aliran sungai (50 meter) dan sumber mata air (200 meter) adalah penjahat lingkungan.	4,38	4,615	3,83	0,001
6.	Untuk memenuhi kebutuhan kayu bangunan yang makin mahal dan sulit diperoleh, masyarakat harus menanam sendiri pohon-pohon di kebun.	5	5,105	5	0,102 ^{ns}
7.	Setiap jiwa yang tinggal di wilayah Pagaralam wajib untuk menanam pohon penghijauan.	4,74	4,985	5	0,002

Keterangan: ns = non-significant berarti sikap para pihak tidak berbeda secara nyata; angka probabilitas kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan sikap antarpihak.

Remark: ns = non-significant means attitude among stakeholders is not different significantly; Probability value less than 0,05 meant attitude among stakeholders is different significantly

Para pihak pengguna lahan di Pagaram memiliki sikap yang sama terhadap tindakan penanaman pohon-pohon penghasil kayu bangunan di kebun. Menurut mereka, penanaman pohon dalam jumlah terbatas yang tidak mengganggu tanaman pokok adalah tindakan yang dapat diterima. Hasil penelitian yang menarik adalah bahwa ternyata petani sayur setuju dengan kewajiban penanaman pohon untuk penghijauan, sementara petani kopi sedikit meragukannya. Pohon penghijauan dirasakan perlu keberadaannya oleh petani sayur karena lingkungan sekitar mereka yang kini terbuka dan terasa panas pada siang hari.

Petani kopi adalah pengguna lahan utama dalam lanskap Kota Pagaram. Tabel 4

menampilkan perbedaan nilai sikap antara kelompok petani kopi dengan kelompok pemerintah. Lanskap tertentu sangat disetujui oleh kelompok pemerintah daerah untuk dipertahankan sebagai hutan, namun kelompok petani kopi dan ketua RW menunjukkan sikap yang cenderung ragu-ragu. Perbedaan sikap tersebut sangat mencolok terutama untuk perlindungan hutan di lanskap berbukit dan kanan kiri sungai. Bagi petani kopi, perbukitan dan kanan-kiri sungai adalah tempat favorit untuk berkebun kopi. Namun demikian, petani kopi setuju dengan tindakan penanaman pohon-pohon penghasil kayu bangunan pada lanskap-lanskap yang mereka usahakan sebagai kebun kopi.

Tabel 4. Rataan nilai sikap kelompok petani kopi dan pemerintah terhadap lanskap berhutan
Table 4. Mean score of attitude of coffee growers and government officials toward forested landscape

No.	Pernyataan sikap (Statements of attitude)	Rataan nilai sikap kelompok kepentingan (Mean score of major stakeholder attitude)			Probabilitas (Probability)
		Kopi	RW	Pemda	
1.	Hutan yang berada di kawasan hutan lindung tidak boleh ditebang.	5,17	5,25	5,88	0,005
2.	Hutan yang berada di atas lahan yang kemiringannya lebih dari 45 derajat tidak boleh ditebangi, meskipun pada lahan milik.	4,345	4,75	5,63	0,000
3.	Lahan yang berada 50 meter dari kanan kiri sungai tidak boleh menjadi kebun dan tetap dibiarkan menjadi hutan.	4,52	4,25	5,50	0,001
4.	Lahan yang berada 200 meter di sekitar mata air tidak boleh diganggu dan dibiarkan sebagai hutan.	4,91	4,00	5,63	0,000
5.	Orang yang berkebun di sekitar aliran sungai (50 meter) dan sumber mata air (200 meter) adalah penjahat lingkungan.	4,38	4,25	5,50	0,002
6.	Untuk memenuhi kebutuhan kayu bangunan yang makin mahal dan sulit diperoleh, masyarakat harus menanam sendiri pohon-pohon di kebun.	5	4,00	3,25	0,003
7.	Setiap jiwa yang tinggal di wilayah Pagaram wajib untuk menanam pohon penghijauan.	4,74	4,75	5,38	0,000

Keterangan: angka probabilitas kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan sikap antarpihak.

Remark : Probability value less than 0,05 meant attitude among stakeholders is different significantly

Tabel 5 memperlihatkan korelasi antara sikap kelompok pengguna lahan, yakni petani kopi, padi dan sayur terhadap lanskap berhutan dengan atribut pribadi mereka. Perbedaan sikap terhadap semua pernyataan tentang lanskap berhutan antar partisipan penelitian dari kelompok pengguna lahan ini secara umum hanya berkorelasi dengan atribut

pilihan usahatani, tidak dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan, pendapatan dan luas lahan usahatani. Atribut luas lahan usahatani hanya berkorelasi secara negatif dengan sikap terhadap kewajiban menanam pohon penghijauan, di mana pemilik lahan sempit cenderung tidak setuju dengan kewajiban tersebut.

Tabel 5. Hubungan antara atribut partisipan penelitian dari kelompok pengguna lahan dengan sikap terhadap lanskap berhutan

Table 5. Correlation between attitude toward forested landscape and land users personal attributes

No.	Sikap terhadap pernyataan... (Attitude toward statements...)	Atribut partisipan kelompok pengguna lahan (Land users personal attributes)			
		Usahatani (Farming)	Pendidikan (Education)	Pendapatan (Income)	Luas lahan usahatani (Wide of farming land)
1.	Hutan yang berada di kawasan hutan lindung tidak boleh ditebang.	0,218*	0,133	- 0,136	- 0,123
2.	Hutan yang berada di atas lahan yang kemiringannya lebih dari 45 derajat tidak boleh ditebangi, meskipun pada lahan milik.	0,288**	0,086	- 0,078	0,04
3.	Lahan yang berada 50 meter dari kanan kiri sungai tidak boleh menjadi kebun dan tetap dibiarkan menjadi hutan.	0,322**	0,069-	- 0,104	- 0,029
4.	Lahan yang berada 200 meter di sekitar mata air tidak boleh diganggu dan dibiarkan sebagai hutan.	0,305**	- 0,036	0,087	- 0,076
5.	Orang yang berkebun di sekitar aliran sungai (50 meter) dan sumber mata air (200 meter) adalah penjahat lingkungan.	0,27**	0,07	- 0,087	- 0,01
6.	Untuk memenuhi kebutuhan kayu bangunan yang makin mahal dan sulit diperoleh, masyarakat harus menanam sendiri pohon-pohon di kebun.	0,209*	0,112	- 0,013	- 0,128
7.	Setiap jiwa yang tinggal di wilayah Pagaralam wajib untuk menanam pohon penghijauan.	0,309**	0,027	0,014	- 0,167*

Keterangan:

1. Kecuali usahatani, korelasi antara karakteristik responden dan sikapnya dianalisis menggunakan Metode Spearman. Usahatani merupakan kategorisasi (nominal) sehingga menggunakan analisis korelasi Cramer.
2. ** dan * berarti secara berturut-turut korelasi signifikan untuk tingkat kepercayaan 99% dan 95%

Remarks:

1. Except for farming, the correlation between respondent characteristics and his/her attitudes were analyzed using the Spearman method. Farming score is categorization, so that analyzed by Cramer correlation.
2. ** and * meant significant correlation in 99% and 95% level of confidence respectively

B. Pembahasan

Temuan pertama penelitian ini adalah terjadi kesenjangan persepsi yang lebar antara pemerintah dengan masyarakat lokal pengguna lahan, terutama kelompok petani sayur, dalam menilai penting atau tidaknya lanskap berhutan. Ini mengindikasikan bahwa gerakan pencegahan deforestasi dan penghijauan kembali yang didengung-dengungkan pemerintah belum membumi dan cenderung tertuju untuk masyarakat kota/hilir saja. Ketidakefektifan implementasi kebijakan pemerintah ini menyebabkan deforestasi di daerah-daerah yang jauh dari kota masih tetap berlangsung dan upaya penanaman kembali (rehabilitasi) kurang mendapat dukungan, sebagaimana juga terjadi pada kasus deforestasi di dataran tinggi Filipina (Jensen, 2003). Kebijakan hanya menyentuh aspek teknis kewajiban larangan menebangi hutan pada lanskap tertentu dan penanaman saja, tidak memperhatikan aspek institusi yang mencakup pengetahuan dan norma-norma yang diyakini masyarakat.

Meskipun hasil penelitian Verbist *et al.* (2005) dalam kasus sistem agroforestri kopi di Lampung menyebutkan bahwa deforestasi hanya merupakan fase awal perubahan tata guna lahan di hulu DAS dan setelah itu akan terjadi “penanaman pohon kembali”, tetapi lanskap yang mulai berhutan dalam kasus di Kota Pagaralam tidak terjamin untuk makin berhutan atau bertahan lama. Masyarakat lokal menilai peran ekonomi hutan hanya dari penyediaan kayu bangunan untuk keperluan rumah tangga saja. Nilai ekonomi lahan akan didapatkan apabila lanskapnya berubah menjadi pertanian. Perbedaan persepsi yang lebar antara pemerintah dan pengguna lahan ini akan memunculkan ketidakpastian keadaan lanskap, sehingga keberlanjutan nilai penting hutan tidak dapat dipertahankan.

Dibandingkan nilai ekonomi, nilai ekologi hutan lebih dihargai masyarakat. Karenanya,

pintu masuk untuk memulai pengelolaan lanskap hutan di daerah hulu DAS seperti Pagaralam adalah lebih tepat melalui isu-isu lingkungan. Menurut Frost *et al.* (2006), tindakan pertama yang penting dalam program penghutanan kembali lanskap tertentu yang seharusnya berhutan adalah mengelola interseksi kepentingan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif. Keterlibatan masyarakat dapat terjadi apabila kepentingan perlindungan lingkungan yang mereka butuhkan, seperti banjir dan kekeringan, dihubungkan dengan nilai penting lanskap berhutan.

Masyarakat lokal pengguna lahan ternyata memiliki sikap yang berbeda untuk hutan pada lanskap tertentu. Sikap paling positif mereka tujukan bagi hutan di sekitar mata air, diikuti hutan di kanan kiri sungai. Sementara itu, mereka menunjukkan ketidaksetujuan dan keraguan terhadap larangan merusak hutan di perbukitan yang memiliki kemiringan curam. Sikap pada penelitian ini menunjukkan nilai-nilai yang dipegang oleh para pihak. Menurut Hermans dan Thissen (2008), nilai-nilai menyediakan arah kemana aktor-aktor akan melangkah. Nilai-nilai berhubungan dengan apa yang dianggap baik atau lebih disukai untuk dilakukan oleh aktor. Ini berhubungan dengan tujuan dan sasaran dari tindakan aktor, dalam hal ini pemenuhan nafkah keluarga. Ini berarti, kebijakan pengurangan deforestasi dan penanaman kembali di daerah hulu sungai lebih sesuai untuk diprioritaskan bagi lanskap sekitar mata air dan kanan kiri sungai, di mana resistensi masyarakat paling minim.

Temuan akhir yang penting dalam penelitian ini adalah bahwa sikap pengguna lahan terhadap lanskap berhutan dipengaruhi oleh faktor pilihan usahatani. Petani sayur secara umum memiliki sikap negatif terhadap lanskap berhutan. Sistem pertanian sayur diyakini membutuhkan sinar matahari secara langsung, sehingga keberadaan pohon tidak diperlukan. Pertanian sayur yang diusahakan

sepanjang tahun memerlukan pemeliharaan intensif yang membutuhkan penyiraman. Petani sayur meyakini bahwa posisi lahan yang terbaik adalah makin dekat ke arah puncak gunung, karena kebutuhan air dapat dipenuhi dari kabut yang menyelimuti punggung gunung. Keyakinan ini berasosiasi positif dengan deforestasi hutan gunung. Apabila makin banyak petani kopi beralih profesi menjadi petani sayur dan jumlah petani sayur makin dominan, maka lanskap berhutan di wilayah pegunungan akan makin terancam.

Temuan-temuan yang menyingkap persepsi para pihak dalam penelitian ini sebaiknya menjadi peringatan dan penunjuk arah pengelolaan hutan di daerah hulu DAS yang berbasis lanskap. Menurut Pacheco *et al.* (2011), program REDD+ sebaiknya sejalan dengan arah perubahan lanskap dan aktor-aktor yang relevan, agar dapat secara efektif memitigasi perubahan iklim dalam lanskap hutan. Karenanya, selain kegiatan penyadaran nilai penting hutan bagi masyarakat pengguna lahan melalui media-media yang mengangkat isu-isu lingkungan, program-program penanaman kembali harus lebih ditujukan pada lanskap-lanskap tertentu yang bernilai konservasi tinggi, seperti sekitar mata air dan kanan-kiri sungai. Penanganan masalah deforestasi dan penanaman kembali tidak menjadi domain sektor kehutanan saja, tetapi lebih membutuhkan aksi sektor lain. Dalam kasus makin meluasnya perkebunan sayur, maka peran perencanaan tata ruang dan sektor pertanian haruslah sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Aktor-aktor pemerintah dan kelompok pengguna lahan menunjukkan persepsi dan sikap yang berbeda dalam menilai penting

tidaknya lanskap berhutan di DAS Musi bagian hulu, Kota Pagaralam. Pemerintah meyakini semua peran eksistensi lanskap berhutan, namun kelompok pengguna lahan beranggapan bahwa hanya fungsi-fungsi ekologi yang dapat dihasilkan oleh lanskap berhutan. Kelompok pengguna lahan lebih menyetujui lanskap sekitar mata air dan kanan kiri sungai untuk dipertahankan sebagai hutan atau dihutankan kembali. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih dalam tentang alasan-alasan dibalik munculnya persepsi dan sikap masyarakat ini, baik dari aspek pengetahuan maupun institusi lokal.

Pengelolaan lanskap hutan di daerah dataran tinggi, seperti dalam kasus Kota Pagaralam, sebaiknya diawali dengan program peningkatan kesadaran masyarakat pengguna lahan tentang nilai penting hutan dengan menggunakan media-media yang mengangkat isu-isu lingkungan, seperti ancaman banjir dan kekeringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, A. 1999 Agricultural expansion and deforestation: modelling the impact of population, market forces and property rights. *Journal of Development Economics* 58: 185-218.
- Arifin, H.S., C. Wulandari, Q. Pramukanto, R.L. Kaswanto, 2009. Analisis Lanskap Agroforestri. IPB Press, Bogor.
- Boucher, D., 2010. Deforestation today: It's Just Business. *Tropical Forest and Climate*. Union of Concerned Scientists, Briefing 7.
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2009. Statistik Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
- Dolisca, F., J.M. McDaniel, L.D. Teeter, 2007. Farmers' perception towards forests: A

- case study from Haiti. *Forest Policy and Economics*, 9: 704-712.
- Frost, P., B. Campbell, G. Medina, L. Usongo, 2006. Landscape-scale approaches for integrated natural resource management in tropical forest landscape. *Ecology and Society* 11 (2):30.
- Harian Republika [Republika], 21 November 2011. Alih fungsi lahan picu kerusakan hutan jati di Hutan Lindung Gunung Dempo.
- Harian Seputar Indonesia [Sindo], 10 Februari 2011. DPRD minta pengawasan hutan diperketat.
- Harian Sumatera Ekspres [Sumeks], 13 September 2011. Air terjun menghilang.
- Harian Sumatera Ekspres [Sumeks], 17 November 2011. Berpotensi banjir bandang.
- Harian Sumatera Ekspres [Sumeks], 27 Agustus 2011. Perbukitan terancam longsor.
- Harian Sumatera Ekspres [Sumeks], 31 Oktober 2011. 30 hektare sawah kekeringan.
- Hermans, L.M., W.A.H. Thissen, 2008. Actor analysis methods and their use for public policy analysts. *European Journal of Operational Research*. doi: 10.1016/j.ejor.2008.03.040.
- Jensen, C., 2003. Development assistance to upland communities in the Philippines. World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor.
- Keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Mather, A. S. 2007. Recent Asian forest transitions in relation to forest transition theory. *International Forestry Review* 9(1): 491-502.
- Pacheco, P., M. Aguilar-Stoen, J. Borner, A. Etter, L. Putzel, M.C.V. Diaz, 2011. Landscape transformation in Tropical Latin America: Assessing Trends and Policy Implications for REDD+. *Forests*, 2: 1-29.
- Rámirez, R. 1999. Stakeholder analysis and conflict management. Di dalam Buckles D, editor. *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*. New York: IDRC/World Bank.
- Rudel, T.K., O.T. Coomes, E. Moran, F. Achard, A. Angelsen, J. Xu, E. Lambin, 2005. Forest transitions: towards global understanding of land use change. *Global Environmental Change* 15: 23-31.
- Rudel, T.K., R. Defries, G.P. Asner, W.F. Laurance, 2009. Changing drivers of deforestation and new opportunities for conservation. *Conservation Biology*, Volume 23 No.6: 1306-1405.
- Santoso, S., 2001. Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Verbist, B., A.E.D. Putra, S. Budidarsono, 2005. Factors driving land use change: Effects on watershed functions in a coffee agroforestry system in Lampung, Sumatra. *Agricuktural Systems*, 85: 254-270.